



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
JOMBANG**

**K E P U T U S A N**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 03 TAHUN 1997**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN**

**PEMBERANTASAN (SWALAYA) DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)  
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Jombang masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang belum dapat ditanggulangi sepenuhnya oleh Pemerintah;
  - b. bahwa upaya pemberantasan dengan cara penyemprotan insektisida/fogging yang selama ini dilakukan, perlu terus dikembangkan dengan melibatkan peran serta swadaya masyarakat;
  - c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut konsideran huruf b, dipandang perlu menetapkan ketentuan dan tata laksananya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
  3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;
  5. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 581/Menkes/SK/VII/1982 tentang Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue.

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal PPM dan PLP Departemen Kesehatan Nomor 61-I/PB 05.01.03.01 tanggal 5 Pebruari 1988 perihal Penanggulangan Demam Berdarah Dengue;
  2. Surat Direktur Jenderal PPM dan PLP Departemen Kesehatan Nomor 230-I/PB 05.01.03 tanggal 25 Mei 1988 perihal Langkah-langkah Menghadapi Musim Penularan Demam Berdarah Dengue.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PELAKSANAAN PEMBERANTASAN (SWADAYA) DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

#### Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan ketentuan dan tata laksana penyemprotan Insektisida/Fogging dalam rangka pemberantasan (swadaya) Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

#### Pasal 2

Penyemprotan Insektisida/Fogging untuk pemberantasan (swadaya) Nyamuk Demam Berdarah Dengue (DBD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, dapat dilaksanakan sepanjang diperlukan, dengan ketentuan :

- a. Berdasar permohonan tertulis Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Kepala Puskesmas setempat dengan tembusan Camat;
- b. Terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan lokasi, oleh Petugas Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, guna memastikan keberadaan jentik Nyamuk, Aedes Aegypti pada lingkungan Desa setempat.

#### Pasal 3

Kegiatan penyemprotan dimaksud Pasal 2 Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, dilaksanakan oleh Tim dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang atau Petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 4

- (1) Guna menunjang kelancaran dan pembiayaan pelaksanaan kegiatan penyemprotan dimaksud Pasal 3 Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan adanya bantuan biaya swadaya masyarakat sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Kepala Keluarga untuk satu kali siklus penyemprotan;
- (2) Bantuan biaya dimaksud ayat (1) Pasal ini, bersifat suka rela dan dihimpun dari warga masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi penyemprotan;
- (3) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk, memantau dan ikut serta membantu pelaksanaan pemberantasan (swadaya) Demam Berdarah Dengue (DBD) di Desanya dan melaporkan pelaksanaannya pada Camat setempat.

Pasal 5

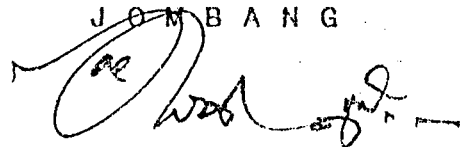
Hal-hal lain yang belum ditentukan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;

Ditetapkan di : Jombang  
pada tanggal : 3 Februari 1997

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIOWO

DIMUKAKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

3 Februari 1997 NO. : 03 /D.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya;

## PROPOSAL PELAKSANAAN FOGING SWADAYA

### *PELAPORAN KASUS*

#### PUSKEMAS

Ada laporan kasus DBD dari Desa/RS/Dinas.

Puskesmas mengadakan klarifikasi kasus yang dilaporkan masyarakat.

Jika kasus tersebut benar-benar DBD, Puskesmas segera mengadakan Penyelidikan Epidemiologi (PE).

Dari PE bisa disimpulkan apakah memang perlu diadakan foging atau tidak.

Kalau memang perlu diadakan foging, maka Puskesmas segera mengirim permintaan ke Dinas Kesehatan untuk foging swadaya

#### DINAS KESEHATAN

Membalas surat Puskemas dengan tembusan Desa yang akan diadakan foging dan menentukan jadwal pelaksanaan.

Menyiapkan kebutuhan foging.

### *PERSIAPAN PELAKSANAAN*

#### PUSKEMAS

Memberitahukan kepada Lurah/RW/RT akan dilaksanakannya foging dan meminta bantuannya menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan Gerakan PSN/3M 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan foging dan kegiatan ini diharapkan menjadi kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh masyarakat.

Memberikan penyuluhan seperlunya.

#### DINAS KESEHATAN

Menyiapkan kebutuhan foging :

Perincian kebutuhan (untuk +/- 300 rumah/15 Hektar dengan 1 siklus foging) dengan asumsi 1 Ha = 20 rumah

Bahan

1. Insektisida (Malation/Cynoff)  
 $300/20 \times 0,5 \text{ liter} = 7,5 \text{ liter}$
2. Bahan Pembantu Foging  
Solar :  $300/20 \times 10 \text{ ltr} = 150 \text{ liter}$   
Premium mesin fog :  $300/20 \times 1,5 \text{ ltr} = 22,5 \text{ liter}$   
Premium kendaraan R-4 : 15 liter

### Perhitungan Kebutuhan Dana

1. Upah Petugas  
7 Or x 1 Hr
2. Insektisida  
7,5 liter -
3. Bahan Pembantu Foging  
Solar : 150 liter  
Premium mesin fog : 22,5 liter  
Premium kendaraan R-4 : 20 liter
4. Perjalanan  
Dati II sebagai Supervisor  
2 Or x 1 Hr  
Puskesmas  
PE dan Penyuluhan  
2 Or x 2 Hr
5. Lain-lain
  - a. Konsumsi  
10 Or
  - b. Pemeliharaan mobil
  - c. Foto copy buku Petunjuk PSN

Jumlah kebutuhan dana keseluruhan :

Dengan malation swadaya : Rp. 4.000,-/rumah

Malation subsidi : Rp. 1.500,-/rumah

### PELAKSANAAN

Sebelum pelaksanaan diminta bantuan kepada Lurah/RW/RT untuk memberitahukan kepada setiap keluarga yang bersangkutan agar :

- a. Menutupi pintu jendela dan membiarkan tertutup sampai +/- 15 – 30 menit
- b. Menutup makanan
- c. Menyelimuti sangkar burung
- d. Mematikan api/kompot

Pelaksanaan foging dilaksanakan pagi/sore hari  
insektisida yang dipakai : malation ( 1 : 20 )

### REKORD

Menggunakan form CV.1

URAIAN PENGELUARAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH BIAYA (Rp.)	KETERANGAN
<b>Kegiatan DBD</b>			<b>25,648,000</b>	
19. Pengadaan Abate	175 Kg	50,000	8,750,000	
20. Pemeliharaan mesin Fog	1 PT	200,000	200,000	
21. Penanggulangan fokus				
- Upah	336 OH	4,000	1,344,000	
- Bahan	8 PT	249,000	1,992,000	
- Perjalanan				
Petugas Dinkes Kab.	16 OH	15,000	240,000	
Petugas Puskesmas	48 OH	5,000	240,000	
22. Pengadaan malation	120 Lt	100,000	12,000,000	
23. Pertemuan petugas DBD Pusk.			272,000	
24. Supervisi ke Pusk.	34 OH	15,000	510,000	
25. Pengadaan format lap. DBD	1 PT	100,000	100,000	
26. Biaya Umum			<b>2,250,000</b>	
<b>JUMLAH</b>			<b>45,000,000</b>	

PENGAMATAN  
KASUS DBD DI KABUPATEN JOMBANG  
TAHUN 2000 S / D JANUARI 2001

I. PENDAHULUAN

Penyakit Demam Berdarah Dengue adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Virus Dengue yang ditularkan melalui gigitan vector / atau binatang perantara yaitu nyamuk *Aedes Aegypti* pada manusia. Penyakit ini meresahkan masyarakat karena dapat menyebabkan kematian terutama pada anak-anak, belum ada obat maupun vaksin pencegahannya, dan bila penanganannya terlambat memerlukan biaya pengobatan yang lebih besar. Namun sebetulnya penyakit ini dapat dicegah penularannya dengan cara memutus rantai kehidupan vector nyamuk *Aedes Aegypti* dengan melakukan gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melalui 3 M (Menguras, Menutup, Mengubur). Kegiatan PSN sangat mudah, murah dan paling efektif yang dapat dilakukan masyarakat dibandingkan cara penanganan yang lain (Foffing, Abatisasi dan lain-lain)

II. SITUASI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 1999 S / D 2000

Berdasar data yang tercatat di Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang kasus DBD mulai tahun 1999 sampai dengan 2000 sebagai berikut :

DATA PENDERITA DBD

NO	BULAN	TAHUN			KET
		1999	2000	2001	
1	JANUARI	4	3	16	
2	FEBRUARI	2	3		
3	MARET	1	4		
4	APRIL	2	4		
5	MEI	3	3		
6	JUNI	5	0		
7	JULI	1	1		
8	AGUSTUS	1	2		
9	SEPTEMBER	1	4		
10	OKTOBER	3	2		
11	NOPEMBER	6	6		
12	DESEMBER	14	5		

Data sampai dengan 7 Februari 2001

III. SITUASI KASUS DBD S / D BULAN JANUARI 2001 YANG TERLAPORKAN DARI RUMAH SAKIT ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

NO	NAMA	UMUR (TAHUN)	ALAMAT	TEMPAT DIRAWAT	SAAT SAKIT	UMPAN BALIK	KET
1	Rosa K	6.5	Karobelah-Mjg	RSK	14 Jan	18 Jan	
2	Pao-pao	30	Kepatihan-Jbg	RSUD	19 Jan	Aktif	
3	Andik	13	Candimulye-Jbg	RSUD	20 Jan	Aktif	
4	Dwi Nugroho	6	Jembatan-Jbg	RSUD	20 Jan	Aktif	
5	Sri wahyuni	5	Plosogenuk-Perk	RSUD	18 Jan	Aktif	
6	M. Rizki	5.5	Banjarsari-BKM	RS Saiti	3 Jan	23 Jan	
7	Lutfia A.	13	Menganto-Mjw	RSK	15 Jan	19 Jan	
8	Heru C.	24	Mojotengah-Brg	RSK	22 Jan	24 Jan	
9	Maliki	15	Mojotengah-Brg	RSK	20 Jan	26 Jan	
10	Yoyok H.	22	Japanan-Mjw	RSK	25 Jan	29 Jan	
11	Ir. Suwoto	48	PuloLor-Jbg	RS Gatoel	24 Jan	10 Feb	
12	Fani Bagus S.	13	Jatipelem-Dwk	RSUD	29 Jan	12 Feb	
13	Fathoni	14.5	Perak	RSUD	28 Jan	12 Feb	
14	Citra Dewi	10	Jelakombo-Jbg	RSUD	31 Jan	12 Feb	
15	Rozaki	6.5	Pundong-Diwek	RSUD	30 Jan	12 Feb	
16	Ardiana	3.5	Sumobito	RS Adi Hsd	26 Jan	5 Feb	

CATATAN:

1. Laporan /m sumber data dari W2 (mingguan puskesmas) = nihil
2. Berdasarkan laporan masyarakat / petugas kesehatan baik surat / lesan ternayat masih banyak kasus yang tidak / yang belum melaporkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.
3. Indikator program DBD tahun 2001 (sampai dengan Januari 2001 )
  - a. IR
  - b. CFR
  - c. ABJ

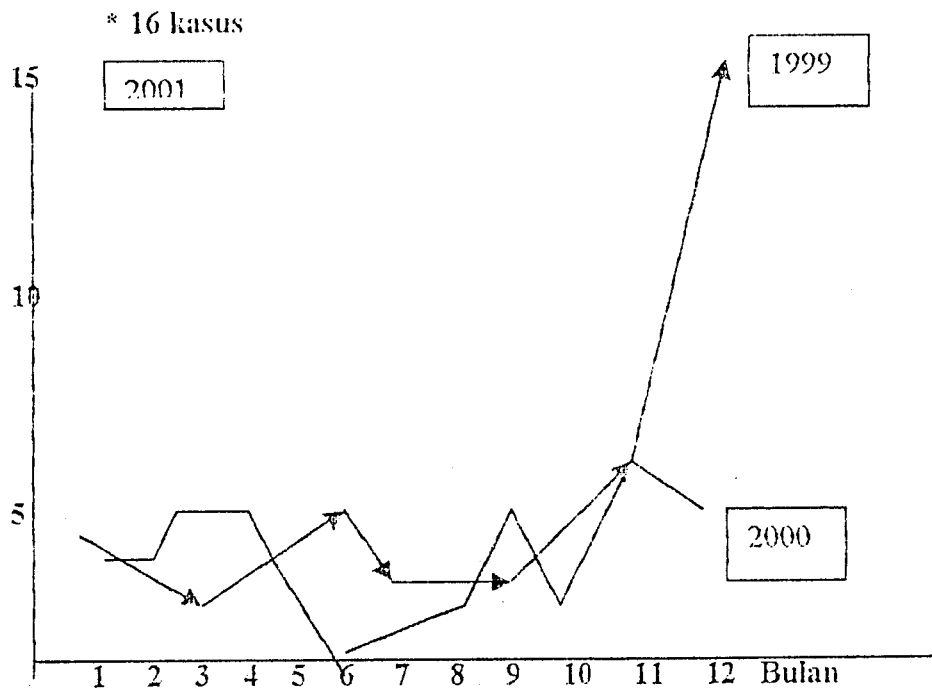


Adapun indikator program pemberantasan DBD :

NO	INDIKATOR	NASIONAL	JOMBANG	
			1999	2000
1	Incidentrate / 100000	10 / 100000	3,9	3,4
2	CFR	1%	0	0
3	ABJ	95%	80%	80%

## GRAFIK PENDERITA DBD

TAHUN 1999 SAMPAI DENGAN JANUARI 2001



### IV. ANALISA

#### 1. Incident Rate

Apabila grafik diatas diamati maka terdapat kenaikan kasus DBD yang menyolok dimana pada bulan Januari 2001 terjadi kenaikan sebanyak 12 kasus (3x) dibanding bulan Desember 2000 (5 kasus) dan hampir lebih 4 x dibanding bulan yang sama pada tahun 2000.

Pola musim penyakit ini terlihat mundur dibanding tahun 1999 dan 2000 karena mengikuti musim hujan yang juga terjadi agak terlambat.

2. CFR tahun 1999, 2000, 2001 (Januari) masih = 0 dari data yang dilaporkan. Berarti belum ada kematian akibat kasus DBD

#### 3. ABJ (Angka Bebas Jentik)

Data yang ada selama ini terlihat tidak akurat mengingat I R DBD masih tinggi. Dari data yang ada masih dibutuhkan kualitas pengamatan ABJ dan pergerakan PSN yang lebih baik oleh seluruh masyarakat dengan mengaktifkan satgas PSN desa.

#### 4. Distribusi Penyakit DBD berdasar :

- Umur : Merata pada semua umur (terbanyak < 15 tahun)
- Daerah terjangkit : Merata di seluruh wilayah
- Kelas ekonomi atau pekerjaan/ pendidikan : Merata

5. aktu Kesakitan dan umpan balik  
Selisih waktu umpan balik 2 s/d 20 hari

#### V. PENANGANAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Sesuai Protap yang ada maka dilakukan :

1. Klarifikasi dengan diagnosa bila umpan balik berasal dari masyarakat / kasus tidak jelas
2. Melakukan penyelidikan epidemiologi terhadap umpan balik kasus dari RSUD /RS/Dokter bersama-sama dengan Puskesmas Setempat.
3. Tindak lanjut sesuai dengan hasil PE berupa PSN, Abatisasi atau Fogging (telah dilakukan)
4. Mengadakan penyebaran informasi SKD terhadap kasus DBD kepada seluruh kepala Puskesmas untuk meningkatkan penyuluhan terhadap masyarakat dan lintas sector.
5. Menyebarkan informasi tentang penanggulangan DBD ke masyarakat, Puskesmas, Pesantren atau melalui radio.
6. Meningkatkan kecepatan dan keakuratan umpan balik data kasus DBD dengan meningkatkan kerja sama dengan RSUD / RS Swasta / Dokter.
7. Mengadakan penyuluhan langsung kepada sasaran melalui lintas sector / atas permintaan masyarakat (lingkup terdepan)
8. Mengamati secara berkesinambungan terhadap kasus DBD dan antisipasi penanganannya

#### VI. LOGISTIK UNTUK PENANGANAN KASUS DBD PER TANGGAL 19 FEBRUARI 2001

Sebagian sudah didistribusikan untuk penanganan kasus DBD di lapangan selama bulan bulan Januari 2001 berupa Abate 10 Kg. Untuk 1 Puskesmas abatisasi selektif, leaflet/stiker peragaa DBB 34 Puskesmas / pesantren. Buku pedoman 3 M, 3 desa / 3 Puskesmas. Cynof 19lt untuk 3 fokus.

Sisa Logistik :

1. Abate : 190 kg
2. Cynaof : 56 lt

Perencanaan kegiatan pemberantasan DBD sesuai DIPDA TA 2001 (apabila realisasi) berupa :

1. Pengadaan Malation 100 lt = Rp. 10.000.000 @ lt Rp. 100.000
2. Kegiatan Fogging Focus 8 x = (@) Focus Rp. 3.816.000,-

## VII. PERHITUNGAN KEBUTUHAN LOGISTIK PENANGANAN KASUS DBD TAHUN 2001 ASUMSI SAMPAI DENGAN MARET 2001

Dengan berakhirnya musim hujan :

1. Abatisasi selektif
  - a. Kebutuhan :  $20\% \times \text{Juml. rumah} \times 40 \text{ gr}$   
 $20\% \times 300.000 \times 40 \text{ gr} = 2.400.000 \text{ gr} = 2.400 \text{ kg}$   
 $= 2,4 \text{ ton}$
  - b. Tersedia :  $190 \text{ kg} = 19.000 \text{ m}^3$  Bak penampungan air  
Dosis  $10 \text{ gr}/100\text{m}^3$  bak penampungan air
  - c. Kekurangan Abate :  $2.210 \text{ kg}$
2. Fogging (kebutuhan bahan /alat/upah)(protap dan analisa biaya terlampir)  
Kebutuhan :  $3 \times 17 = 51 \text{ focus}$   
Tersedia :
  1. Swadaya sebagian =  $56/7,5 = \pm 7 \text{ focus}$  (Cynof sisa logistik = subsidi)
  2. Swadaya murni =(dianggap - )
  3. Dipda tahun 2001 bila disetujui dan pengadaan dipercepat
    - Focus 8 x (subsidi penuh/gratis)
    - Malation 100 It (sebagai subsidi sebagian )

Catatan :

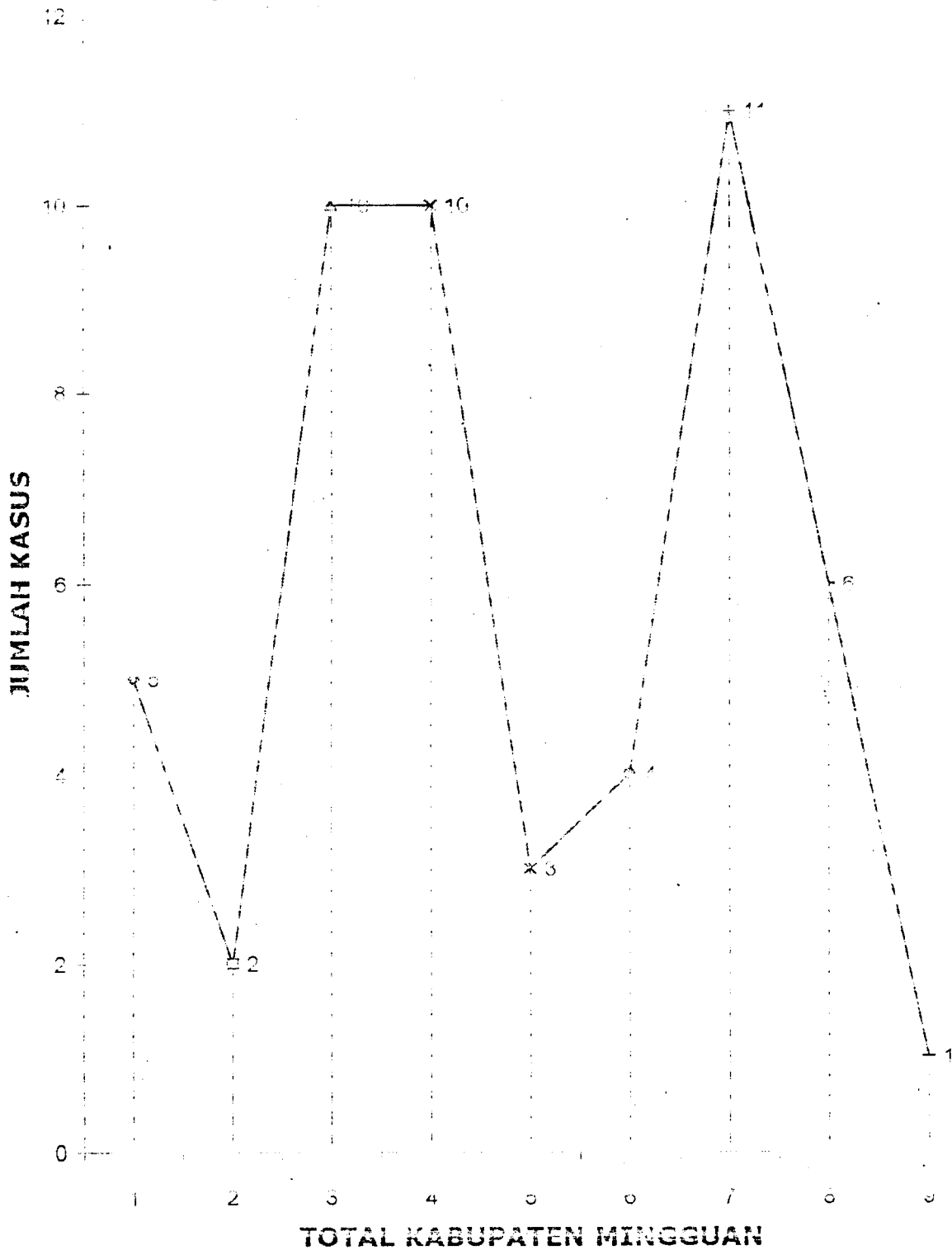
Apabila pendanaan tidak memungkinkan dapat dilaksanakan secara swadaya melalui keputusan pemerintah daerah.

## VIII. KESIMPULAN

Melihat trend penyakit DBD tahun 2001 maka diperlukan penanganan yang cepat dan tepat secara terpadu lintas sector dan lintas program melalui kegiatan PSN dengan 3 M nya. Sebagai kegiatan yang diprioritaskan karena murah , efektif, dan efisien. Sedangkan Fogging dan Abatisasi merupakan kegiatan untuk mempercepat penanggulangan kasus DBD.

Mengingat kejadian kasus DBD ini berpotensi meresahkan warga masyarakat maka perlu menjadi perhatian seluruh pihak-pihak terkait khususnya Pemda Kabupaten Jombang lebih khusus lagi jajaran kesehatan kabupaten Jombang, terutama pemerintah masyarakat bahwa setiap ada kasus DBD harus dilakukan Fogging / penyemprotan.

# GRAFIK MINGGUAN PENYAKIT DBD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2001





**GRAFIK BERGEJEM  
PENYAKIT TUBERKULOSIS KABUPATEN JERAMBA TAHUN 2001**

